

Birokrasi Hambat Pembangunan

Teguh Firmansyah,
Muhammad Fakhruddin

Masalah infrastruktur dan korupsi di Tanah Air juga menjadi sorotan Presiden.

BOGOR — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui ada tiga persoalan utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ketiga permasalahan itu, yakni birokrasi, infrastruktur, dan korupsi. “Kalau dulu (penghalang) polhukam, terutama awal krisis ataupun tahun-tahun setelah krisis, tetapi sekarang adalah birokrasi yang dianggap menjadi penghalang, kedua infrastruktur, dan ketiga korupsi,” ujar SBY, saat membuka rapat kerja evaluasi kinerja kabinet 2011, di Istana Bogor, Jumat (23/12).

Masalah birokrasi cukup menjadi penekanan Presiden. Mengingat masalah ini sudah sering kali disinggung, tapi tak kunjung terselesaikan. Presiden mengingatkan agar dalam rapat kerja pemerintah kali ini bukan hanya tekad dan komitmen, melainkan harus ada perubahan secara fundamental untuk memperbaiki birokrasi.

Menurut SBY, persoalan birokrasi ini kompleks. Reformasi birokrasi tidak hanya sekadar rencana aksi atau identik dengan remunerasi, tetapi juga harus dilihat, baik *output* maupun *outcome*-nya. “Berubah atau tidak,” kata SBY.

Kalau para birokrat bermasalah itu sungguh telah menjadi penghalang dan mereka tak mau berubah, SBY meminta agar mereka diikhlas. Alasannya, lanjut SBY, mereka hanya akan menjadi

penghambat ataupun pengganggu dalam pelaksanaan tugas. “Kalau memang sungguh menjadi penghalang, mereka-mereka yang tidak mau bisa berubah, ya harus kita ikhlaskan untuk tidak bersama-sama kita menjalankan tugas,” tegas SBY.

Persoalan lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Menurut SBY, keberhasilan *Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (MP3EI) akan sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur. Untuk itu, kemampuan anggaran pemerintah harus memfokuskan diri pada belanja modal dan mengurangi belanja rutin.

Saat mengadakan pertemuan dengan kepala daerah se-Indonesia beberapa waktu lalu, menurut SBY, para gubernur telah memiliki komitmen untuk mengurangi belanja rutin. “Mudah-mudahan tertuang dalam APBD dan APBN kita,” imbuhnya.

Adapun soal masalah korupsi, SBY meminta penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab presiden. SBY meminta seluruh jajaran di pemerintahan untuk mengaktifkan upaya pemberantasan korupsi. “Saya ingin tiga tahun mendatang kita sentuh dan tangani baik seluruh persoalan ini. Kalau bisa kita selesaikan masalah-masalah itu, akan besar pengaruhnya dan ekonomi tumbuh.”

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, Presiden konsisten terhadap persoalan terhambatnya pembangunan. Agus mengakui, persoalan utama penghambat pertumbuhan itu adalah reformasi birokrasi dan infrastruktur. Dalam membenahan birokrasi, hal terpenting adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pegawai

negeri sipil (PNS).

Menurut Agus, peningkatan produktivitas birokrasi bukan sekadar mengedepankan peningkatan remunerasi atau meningkatkan penghasilan PNS, melainkan juga harus dibarengi peningkatan efisiensi birokrasi itu sendiri. Agus menilai, remunerasi tidak bersifat permanen. Artinya, remunerasi dalam bentuk tunjangan ataupun *allowance* itu bisa di-*review* jika seandainya PNS tidak menjalankan kerjanya dengan baik. “Tentu, pembantu-pembantu Presiden atau jajaran yang ada di birokrasi harus menindaklanjutinya dengan betul-betul konkret. Jadi, itu yang harus di-upayakan,” tambah Agus.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah, Cecep Effendi, meminta Presiden SBY untuk segera bertindak mengatasi tiga persoalan penghambat pembangunan itu. “Selaku kepala negara, SBY bertanggung jawab langsung terhadap ketiga permasalahan itu,” kata Cecep.

Menurut Cecep, sangat wajar apabila Presiden mengungkapkan tiga permasalahan tersebut sebagai isu besar yang harus dibenahi di Indonesia. Alasannya, kata Cecep, ketiga isu tersebut merupakan isu lama yang setiap tahun menjadi pembicaraan di “World Economic Forum”. “Dalam laporan tersebut, daya saing Indonesia berada di peringkat 50-an dari 133 negara. Isu yang terus menjadi persoalan adalah korupsi dan birokrasi.”

Presiden sebagai kepala negara harus segera bertindak untuk mendorong reformasi birokrasi dan memberantas korupsi. Cecep meminta SBY tidak memosisikan diri sebagai pengamat, tapi sebagai penyelenggara pemerintah di negeri ini. ■ ed: andri saubani



RAPAT KABINET: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono, memimpin Rapat Kerja Pemerintah, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12) pagi.

MWA-Rektor UI Berdamai

Fernan Rahadi

JAKARTA — Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia (MWA UI) Purnomo Prawiro dan Rektor UI Gumilar Somantri berdamai. Keduanya berjabat tangan disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh.

Peristiwa tersebut terjadi setelah dilakukan rapat dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Rektorat UI, dan MWA di gedung Kemendikbud, Kamis (22/12) malam. Rapat berlangsung kurang lebih empat setengah jam dan baru berakhir menjelang tengah malam.

Purnomo mengucapkan terima kasih kepada Mendikbud Mohammad Nuh atas mediasi untuk kesekian kalinya dengan Rektor UI. Sebelumnya, sudah tiga kali pertemuan serupa dilaksanakan, tapi tak didapatkan titik temu. “Terima kasih

atas mediasinya yang membuat MWA berhasil membuat kesepakatan (dengan Rektor UI). Kini, kami perlu doa dari semuanya supaya apa yang diputuskan bisa diterima seluruh *civitas academica*,” ujarnya.

Purnomo menegaskan, sumber permasalahan di UI selama ini hanyalah perbedaan tafsir antara MWA dan Rektor UI atas Peraturan Pemerintah (PP) 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta PP 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai BHMN. “Apa yang muncul di media selama ini cuma eksek-eksek tambahan,” tuturnya.

Sebagaimana Purnomo, Gumilar juga mengucapkan terima kasih atas mediasi yang dilakukan Nuh. “Mediasi berlangsung dengan suasana penuh kehangatan dan keakraban. Terlihat semua pihak mencoba menjaga persatuan dan kesatuan UI dan menjaga mar-

tabat UI,” ujarnya.

Gumilar berharap hasil pertemuan malam itu bisa terus ditindaklanjuti sehingga membuahkannya berjalannya proses transisi yang ditandai upaya-upaya produktif. Ini demi menopang keberlangsungan UI di masa mendatang.

Atas kesepakatan itu, Kemendikbud akhirnya batal turun tangan secara langsung menyelesaikan permasalahan di tubuh UI. Opsi untuk membubarkan semua organ di dalam perguruan tinggi itu, termasuk Rektorat UI dan MWA, juga batal.

Sebab, dengan kesepakatan itu, akan dibentuk tim transisi yang bertugas menyiapkan apa pun yang terkait UI selama masa transisi hingga September 2013. “Jadi, ini bukan Kementerian mengambil alih. Permasalahan ini akan diselesaikan secara internal oleh orang-orang UI sendiri,” kata Nuh.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendikbud Moham-

mad Nuh menawarkan tiga opsi penyelesaian masalah di UI. Salah satunya dengan mengganti seluruh organ di tubuh UI sebagaimana diatur dalam PP No 66/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Nuh menyatakan, opsi serupa telah diambil oleh beberapa universitas besar di Indonesia dalam mengatasi persoalan di lingkup internalnya. Dia menyebut seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Dua opsi lainnya adalah dengan tidak mengganti organ-organ tersebut, tetapi cukup mengganti orang-orangnya. Atau, sama sekali tidak mengganti, baik organ-organ maupun orang-orangnya. “Saya dan Pak Dirjen (Dikti, Djoko Santoso—Red) sedang melakukan *exercise* untuk memilih opsi mana yang paling tepat,” kata Nuh, Rabu (21/12) malam. ■ ed: burhanuddin bella



AUDIT FORENSIK CENTURY: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo (kiri), menyerahkan hasil audit forensik Bank Century kepada Ketua DPR Marzuki Alie (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Priyo B Santoso (ketiga kiri), Pramono Anung, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/11). Hasil audit diselesaikan dalam waktu 125 hari terkait aliran dana *bailout* untuk Bank Century.

Nazar Kembali Tuding Petinggi Demokrat

Muhammad Hafid,
Edy Nasrul

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa M Nazaruddin untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor. Nazaruddin kembali menyebut dugaan keterlibatan petinggi Partai Demokrat dalam kasus ini. “Ya terlibat. Ini makanya (pemeriksaan—Red) nanti tentang pendalaman uang Saan terima di mana, Jafar Hafsa terima di mana, nanti ya,” kata Nazaruddin di kantor KPK, Jumat (23/12).

Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyatakan, pemeriksaan terhadap Nazaruddin dalam kasus Hambalang adalah pemeriksaan lanjutan yang juga dilaksanakan pada Kamis (22/12).

Menurut Nazaruddin, di hadapan penyidik, ia menceritakan soal peran Ketua Umum Partai Demokrat Anas yang mengatur proyek Hambalang. Ia juga menceritakan soal peran anggota DPR dalam kasus itu. Setelah menceritakan itu

semua, ia berharap KPK bisa menindaklanjuti keterangannya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, kemarin, menyatakan, pihaknya akan mendalami keterangan Nazaruddin dalam proses penyelidikan kasus Hambalang. Pendalaman termasuk keterangan Nazaruddin atas dugaan keterlibatan dan aliran dana yang mengalir ke petinggi Partai Demokrat. “Semua keterangan itu akan kita dalami,” kata Adnan.

Namun, Adnan mengaku belum mengetahui secara detail hasil pemeriksaan penyidik terhadap Nazaruddin. Ia juga belum dapat memastikan, siapa pihak yang akan dipanggil untuk mengonfirmasi keterangan Nazaruddin itu.

Menanggapi tuduhan-tuduhan Nazaruddin kepada petinggi Partai Demokrat, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsa, membantah. Menurutnya, pernyataan Nazaruddin yang selalu berubah-ubah belum tentu bisa dijadikan petunjuk penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik KPK. “Itu tidak benar,” jelas Jafar, saat dihubungi, kemarin.

Ia menegaskan, dirinya tidak pernah mengurus proyek Wisma Atlet SEA Games ataupun Hambalang. Jafar meminta Nazaruddin berbicara dengan bukti. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, lewat pesan singkatnya menyatakan, tidak memahami tuduhan Nazaruddin. “Saya tidak mengerti persoalannya.”

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebelumnya menyatakan, semua tuduhan Nazaruddin bukan suatu berita baru. Petinggi Partai Demokrat, katanya, tidak tertarik untuk selalu mengomentari proses persidangan yang tengah dijalani Nazaruddin. “Itu bukan berita baru, setelah berulang-ulang diucapkan,” kata Amir.

Amir juga mengharapkan tidak adanya intervensi dari pihak mana pun terhadap proses hukum terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat itu. “Biarkanlah persidangan berjalan, proses berjalan, jangan ada intervensi dalam bentuk sekecil apa pun agar semuanya menjadi *clear*.” ■ ed: andri saubani

MAHAKA
MEDIA

HARIAN
REPUBLIKA

Bimbingan Belajar Membaca Al-Qur'an untuk Dewasa dan Keluarga

“Sesungguhnya Kami memudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran” (Q.S. Ad-Dukhaan : 58)

Dengan Metode Islami

Pelaksanaan : Sabtu & Ahad, 21 - 22 Januari 2012 Angkatan 38

Tempat : SOFYAN HOTEL, Pukul : 09.00 - 16.00 WIB

Jalan Cut Meutia No. 9 Jakarta Pusat

Setelah 30 menit belajar teori saya langsung bisa baca Al Qur'an luar biasa.

Metode Islami 30 menit ini sangat cocok bagi saya yang sangat sibuk.

Metode Islami 30 menit ini sangat mdah dipahami.

Metode ini sangat mudah, ringan dan praktis.

Saya Mualaf saya langsung bisa membaca Al Qur'an setelah 30 menit belajar teori.

Saya ikut Metode Islami 30 menit langsung bisa baca Al Qur'an.

(J Niar 57 tahun, - Direktur)

(Budi 45 tahun - Karyawan)

(Sony, 40 tahun Pengusaha)

(Dewi, 45 tahun, Karyawan)

(Rina, 20 tahun, Mahasiswa)

(Rio, 15 tahun, Pelajar)

Biaya Rp. 600.000

Peserta akan mendapatkan : ❖ Al-Qur'an ❖ Buku Teori
❖ Makan Siang ❖ Coffee Break

TEMPAT TERBATAS
Hanya 50 Orang/
Angkatan

dipimpin oleh : Ustad Achmad Farid Hasan

Transfer melalui BCA 375.305.666.8 a.n. PT. REPUBLIKA MEDIA MANDIRI
Bukti transfer di fax ke 021 - 79198442

Hubungi : 021-7803747 ext. 204, HP. 081399058843 Sdr. Sudarminto
Zulfi Ida Syarifah : 08158953283

lifty
Memberi Inspirasi



Sofyan Hotels